

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN
KUMUH DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN
LIMA PULUH KOTA PEKANBARU**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI (S.Sos)
Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**

OLEH

SYARWAN HAMID

NIM: 11641102061

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Sebuah skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN LINTAS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

: Syarwan Hamid
: 11641102061
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Rabu, 14 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah


Ketua / Penguji I


Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001


Penguji III


Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Sekretaris / Penguji II

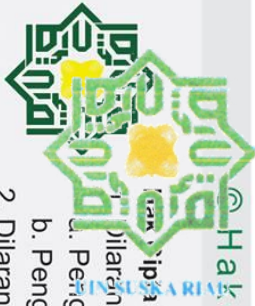

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV


Muhammad Soim, M.A
NIK. 130 417 084

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta, diilindungi hak cipta, dan dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Syarwan Hamid

Nim : 11641102061

Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, S.Ag, M.Si

NIP: 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

U. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, S.Ag, M.Si

NIP: 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni, S.Ag, M.Si

NIP: 19700914 201411 2 001

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si


NIP. 19700301 199903 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN
RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA KOTA PEKANBARU**

Di Susun Oleh



Syarwan Hamid
NIM: 11641102061

Telah disetujui pembimbing pada tanggal: 11 Desember 2019

Pembimbing



Yefni, M.Si
NIP: 197009142014112001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Aslati, M.Ag
NIP: 19700817200701231

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal : SYARWAN HAMID dengan NIM :11641102061 Jurusan :
Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul "IMPLEMENTASI
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM
MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN RINTIS
KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU".

Telah diseminarkan pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Desember 2019

Dengan ini dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Desember 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji I

Yefni, M.Si

NIP. 197009142014112001

Penguji II

Muhammad Soim, MA

NIP. 130417084

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ak Sika Diindungi Undang-Undang

Disi yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, Senin 05 Juni 2023

: Nota Dinas
 : **Pengajuan Ujian Skripsi**
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di_ _____
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **SYARWAN HAMID NIM : 11641102061** dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
 Pembimbing Skripsi

Yefni, S.Ag, M.Si
NIP: 19700914 201411 2 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarwan Hamid
 NIM : 11641102061
 Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru Reteh, 09 November 1997
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juni 2023

Yang membuat pernyataan


Syarwan Hamid
 NIM. 11641102061



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi undang-undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Syarwan Hamid

SN : 11641102061

Title : **Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Reducing Slums in Rintis Village, Fifty City District, Pekanbaru City**

The background of this research is the Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Reducing Slums. The KOTAKU program, based on Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the 2015-2019 national medium-term development plan, mandates the development and development of urban areas through handling the quality of the residential environment, namely improving the quality of slums, preventing the growth of new slums and developing sustainable livelihoods. In this study, George Charles Edward III's Implementation theory was used. There are 4 (four) variables that greatly determine the success of a policy implementation, namely: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The problem of this research is to find out how far the Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Rintis Village is. The purpose of this research is to find out the Implementation of the City Without Slums Program (KOTAKU) in Reducing Slums in Rintis Village, Lima Puluh District, Pekanbaru City. The method used in this study is qualitative with data collection techniques of observation, interviews, documentation. The number of informants in this study amounted to six people including the Pekanbaru City KOTAKU Coordinator, the Rintis Village Facilitator, Rintis village KSM and the heads of RW 01, RW 02, RW 03. Based on the results of research conducted by researchers on the Kotaku Without Slum Program (KOTAKU) which was implemented in the Rintis Sub-District, Lima Puluh District, Pekanbaru City that the implementation of the KOTAKU Program has proceeded as planned. Communication communion between KOTAKU facilitators and the community is well established, both from socialization activities with the community, adequate resources and support from the community in implementing the KOTAKU program and bureaucratic structures that are in accordance with predetermined references.

Keywords: **Implementation, Slums and KOTAKU Program**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada kekasih Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul **"Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru"** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari pembimbing dan pihak-pihak lain, baik bantuan berupa moril maupun materil. Jadi, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada yang teristimewa kepada kedua orang tua saya Ayahanda H. Sulaiman dan Ibunda Hj. Nursiah, terimakasih atas kasih sayang doa dan motivasi serta dukungan yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Dr. H. Arwan M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Dr. Titi Antin, M.Si selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Yefni, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Ricy Wahyuni, S.Sos selaku staff Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 9. Yefni M.Si selaku pembimbing saya yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan dukungan, pengarahan, dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
 10. Dr. A. Ghozali Syafe'I, M.Si selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan masukan kepada penulis dari awal kuliah sampai tahap ini.
 11. Dr. H. Muhammad Tawwaf, S,IP., M.Si selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 12. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 13. Seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 14. M. Hafizd Kustiwa Apriana, ST selaku Koordinator KOTAKU Kota Pekanbaru yang telah memberikan arahan, data informasi yang dibutuhkan penulis.
 15. Sofia, ST selaku Fasilitator Kelurahan Rintis yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
 16. Ketua KSM dan Ketua RW 01, RW 02, RW 03, Kelurahan Rintis yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai tempat rujukan referensi dalam penelitian skripsi
 1. Terimakasih Teruntuk Try Hadirah Muti'ah yang selalu menemani dan mendampingi dalam setiap kesulitan selama penulisan skripsi ini.
 1. Teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Sahabt-sahabat penulis di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2016 semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin.
 2. Teman-teman kos penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap menjadi keluarga di rantauan serta selalu menjaga silaturahmi, Amiin.
- Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa akan datang, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amiin Yarabbal Alamin.*

Pekanbaru 5 Juni 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

SYARWAN HAMID
NIM. 11641102061


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK BAHASA INDONESIA	i
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR DOKUMENTASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Batasan Masalah	6
D. Identifikasi Masalah	6
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teoritis	9
1. Implementasi.....	9
a. Definisi Implementasi	9
b. Model-model Implementasi	10
c. Faktor Keberhasilan dan Penghambat Implementasi	19
2. Permukiman Kumuh	21
3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	25
B. Penelitain Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Validitas Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Program KOTAKU	37
B. Sejarah Singkat Kelurahan Rintis.....	42
1. Visi Misi Kelurahan Rintis	42
2. Letak dan Geografis Kelurahan Rintis.....	42
3. Struktur Pemerintahan Kelurahan Rintis	44
4. Kependudukan	44
5. Pendidikan.....	48
6. Agama.....	48
7. Kesehatan.....	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan	55
1. Komunikasi	55
2. Sumberdaya.....	58
3. Disposisi.....	59
4. Struktur Birokrasi.....	61

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPURAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Batas Wilayah Kelurahan Rintis.....	43
Tabel 4.2	: Luas Wilayah Kelurahan Rintis.....	43
Tabel 4.3	: Jarak Kepusat Pemerintahan.....	43
Tabel 4.4	: Jarak Keobjek-objek Vital.....	43
Tabel 4.5	: Struktur Pemerintahan Kelurahan Rintis.....	44
Tabel 4.6	: Jumlah Penduduk Kelurahan Rintis.....	45
Tabel 4.7	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.8	: Jumlah Penduduk Menurut Segi Umur.....	45
Tabel 4.16	: Jumlah Sekolah di Kelurahan Rintis.....	48
Tabel 4.17	: Pemeluk Agama di Kelurahan Rintis.....	48
Tabel 4.18	: Tempat Ibadah di Kelurahan Rintis.....	49
Tabel 4.19	: Sarana Kesehatan di Kelurahan Rintis.....	49
Tabel 5.1	: Hasil Wawancara Program yang Terlaksana.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Model Donal Van Meter dan Carl Van Hor	13
Gambar 2.2	: Model George Edward III	16
Gambar 2.3	: Kerangka Berpikir	32

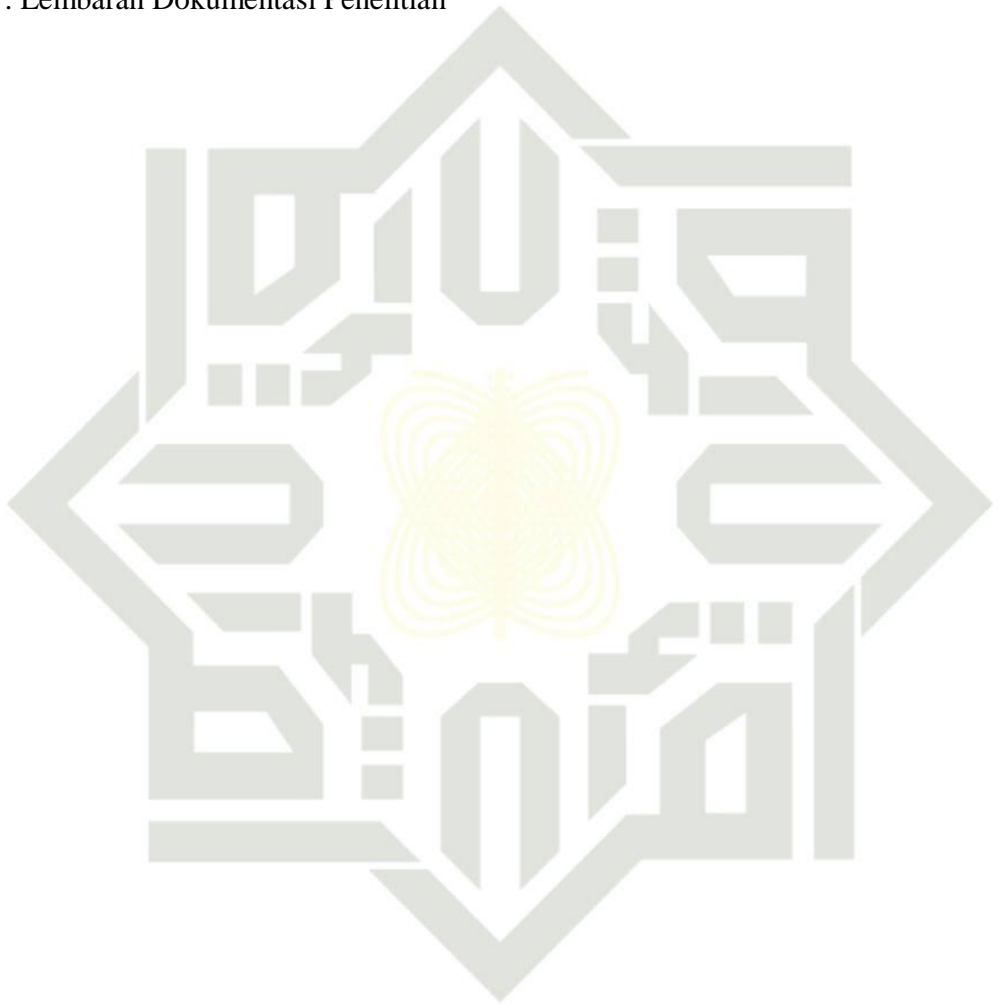


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Lembaran Wawancara
Lampiran 2	: Lembaran Observasi
Lampiran 3	: Lembaran Dokumentasi
Lampiran 4	: Lembaran Dokumentasi Penelitian

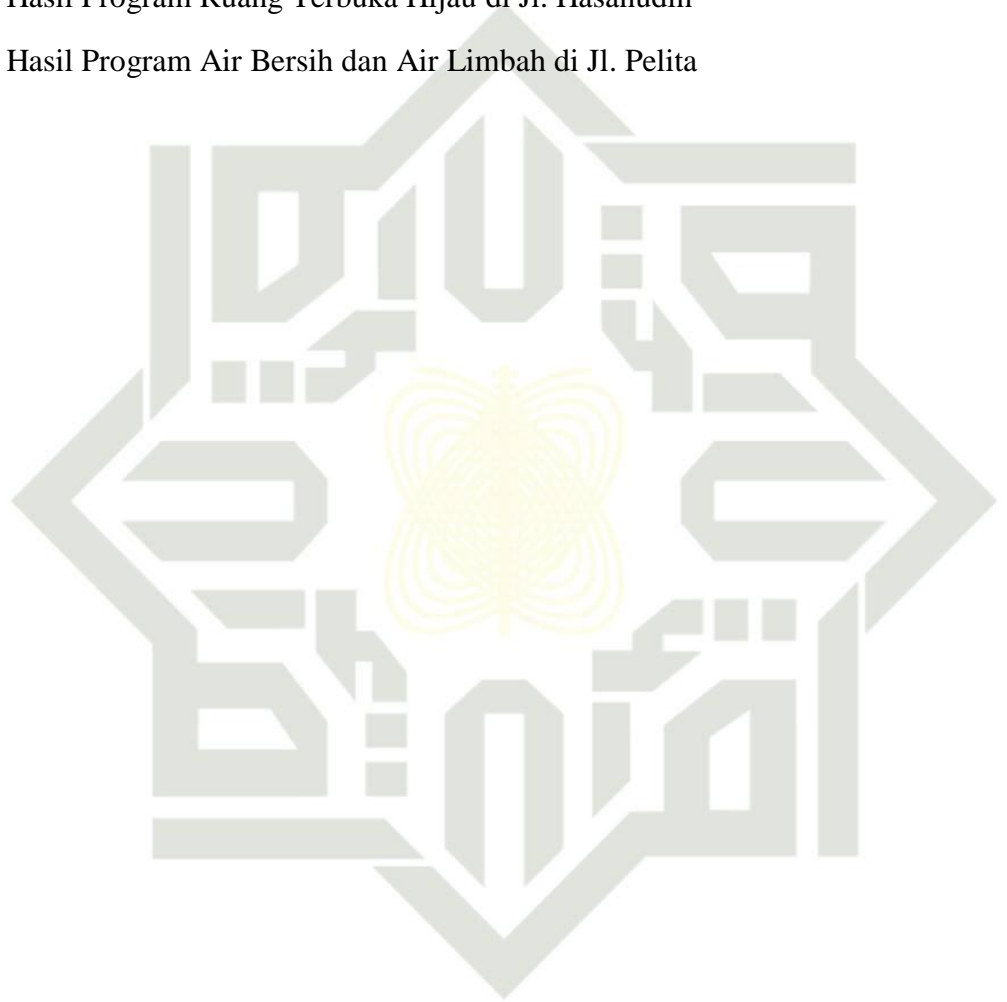


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR DOKUMENTASI

- Gambar 1 : Kegiatan Sosialisasi di Kantor Lurah Rintis
Gambar 2 : Hasil Program Pembangunan Jalan
Gambar 3 : Kegiatan Pemeliharaan Drainase di Jl. Nurul Ikhsan
Gambar 4 : Hasil Program Ruang Terbuka Hijau di Jl. Hasanudin
Gambar 5 : Hasil Program Air Bersih dan Air Limbah di Jl. Pelita



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya pembangunan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan permukiman kumuh dan munculnya kawasan kumuh-kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap masyarakat dan memeberikan citra negative akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan standar minimal pada masyarakat luas.

Permasalah permukiman kumuh sampai saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat perkotaan di Indonesia. Salah satunya pemicu timbulnya permukiman kumuh terjadi akibat lajunya pertumbuhan penduduk yang tinggi, baik itu melalui proses kelahiran maupun proses urbanisasi. Permukiman kumuh merupakan salah satu persoalan yang terjadi dilingkungan hidup masyarakat, karena lingkungan masyarakat merupakan salah satu sumber penghidupan manusia. Oleh karena itu setiap aspek kegiatan manusia harus menjaga lingkungan. Pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak sepenuhnya dapat disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan. Kualitas umum lingkungan rendah dan tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Program KOTAKU berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJM 2015-2019 kota tanpa kumuh tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya mencetuskan pembangunan *platform* kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Target yang tertuang dalam RPJM 2015-2019 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya diantaranya:

- a. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*)
- b. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh
- c. Mencegah terbentuknya kumuh baru

Upaya dalam mewujudkan permukiman bebas kumuh pada dasarnya dilakukan dengan empat komponen intervensi, yaitu:

- a. Pembangunan fisik dan lingkungan, seperti merelokasikan daerah kumuh menjadi rusanawa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih.
- b. *Capacity Building* masyarakat dalam pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman, sanitasi dan air bersih.
- c. Pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh agar dapat bebas dari kemiskinan
- d. Pembangunan sosial budaya masyarakat yang diarahkan agar masyarakat memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang terjamin, serta perubahan perilaku masyarakat untuk sadar dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan.

Penanganan permukiman kumuh tidak dapat dilaksanakan secara sepihak, tetapi secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang berkepentingan, diantaranya pemerintah maupun masyarakat baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kelurahan/Desa. Sedangkan dari pihak masyarakat itu sendiri selaku penerima manfaat serta para pelaku, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pekerjaan, dan pengawasa. Dengan pendekatan ini dapat memberikan sebuah kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk ikut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi dalam menyelesaikan sebuah problem yang ada dimasyarakat dengan menggunakan cara-cara yang cocok dengan kondisi mereka.

Kota pekanbaru merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau yang memiliki lokasi kawasan permukiman kumuh melalui penetapan surat keputusan Walikota Nomor: 189 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dikota pekanbaru dengan Delineasi 124,81 Ha. Kemudian dilakukan Verivikasi pada tahun 2016 dan dilakukan perubahan surat keputusan Walikota Nomor:151 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Walikota Pekanbaru Nomor:189 Tahun 2014 tentang penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dengan Deliniasi 113,56 Ha.

Salah satu Kelurahan di Kota Pekanbaru yang termasuk dalam Deliniasi Kawasan Permukiman Kumuh adalah Kelurahan Rintis dengan luas kawasan Deliniasi 9,70 Ha.¹ Hasil survey awal dengan mewawancarai salah satu warga Kelurahan Rintis mengatakan semenjak adanya Program KOTAKU sangat membantu masyarakat, karena dengan adanya Program KOTAKU dapat mengurangi kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Rintis, namun tidak semuanya karena bantuan yang tidak didapatkan dalam setiap tahun. Akan tetapi setidaknya sudah memberikan kontribusi terhadap lingkungan masyarakat yang terdapat kawasan permukiman kumuh sehingga masyarakat bisa merasakan lingkungan yang bersih, nyaman dan bebas dari permukiman yang kumuh.

Berdasarkan data baseline Kelurahan Rintis terdapat kriteria bangunan fisik dan besaran parameter kumuh diantaranya seperti aksesibilitas lingkungan dengan parameter 17% kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang minimum, dan 35% kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman tidak memiliki kualitas minimum yang memadai. Sedangkan pembangunan drainase lingkungan 20,92 Ha kawasan permukiman yang tidak terjadi genangan air/banjir dengan 30% kondisi

¹ Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), LKM Tunas Rias Mandiri Kelurahan Rintis (2016-2021) hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaringan drainase dilokasi permukiman tidak memiliki kualitas minimum. Dan pelayanan air minum dengan parameter 39% masyarakat tidak terlayani sarana air minum untuk diminum, mandi, dan mencuci. Dan hanya terdapat 12% masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, dan mencuci. Sedangkan pengelolaan air limbah terdapat 2% masyarakat tidak memiliki akses jamban keluarga dan jamban bersama, dan 15% jamban keluarga dan jamban bersama tidak sesuai persyaratan teknis tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septictank. Dan pengelolaan persampahan yang tidak terangkut ke Tempat Pembuangan Sampah 2 kali dalam seminggu.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh 100% sanitasi layak yang lebih di kenal dengan 100-0-100. Target yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang di laksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk Mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat swasta dan kelompok peduli lain.

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan program KOTAKU dengan penelitian yang berjudul “**Implementasi Program Kotak Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru**”

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang berbeda-beda dalam Skripsi ini yang berjudul: Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekbaru, maka penulis memberi penegasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan kemampuan menggunakan materi kedalam situasi kongkrit. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program ataupun kebijakan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman tertentu.²

implementasi kebijakan public dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
 2. Sumberdaya
 3. Disposisi
 4. Struktur Birokrasi
2. Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh 100% sanitasi layak yang lebih di kenal dengan 100-0-100. Target yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang di laksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk Mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat swasta dan kelompok peduli lain. Salah satu tujuan Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa pemukiman kumuh.

² Drs. Peter Salim & Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, 2002) hlm.193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni dengan indikator aksesibilitas jalan lingkungan, aksesibilitas drainase, pelayanan persampahan, pelayanan air bersih, dan pelayanan air limbah yang tidak memenuhi syarat.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan hasil penelitian ini, maka skripsi ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian kepada Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis yang terimplementasi pada tahun 2019

D. Identifikasi Masalah

1. Sejauh mana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengurangi permukiman kumuh.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengurangi permukiman kumuh.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Implementasi Proram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuna Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian
 - a. Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa menambah dan meningkatkan pemahaman serta wawasan penulis dan juga para pembaca tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan dalam penelitian ini disusun secara berurutan yang terdiri dari:

BAB I :PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Berisikan mengenai landasan teori penelitian, penelitian terdahulu yang sejenis, dan kerangka piker dalam penelitian.

BAB III :METODE PENELITIAN

Berisikan tentang lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV :GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Berisikan tentang profil penelitian

BAB V :HASIL PENELITIAN

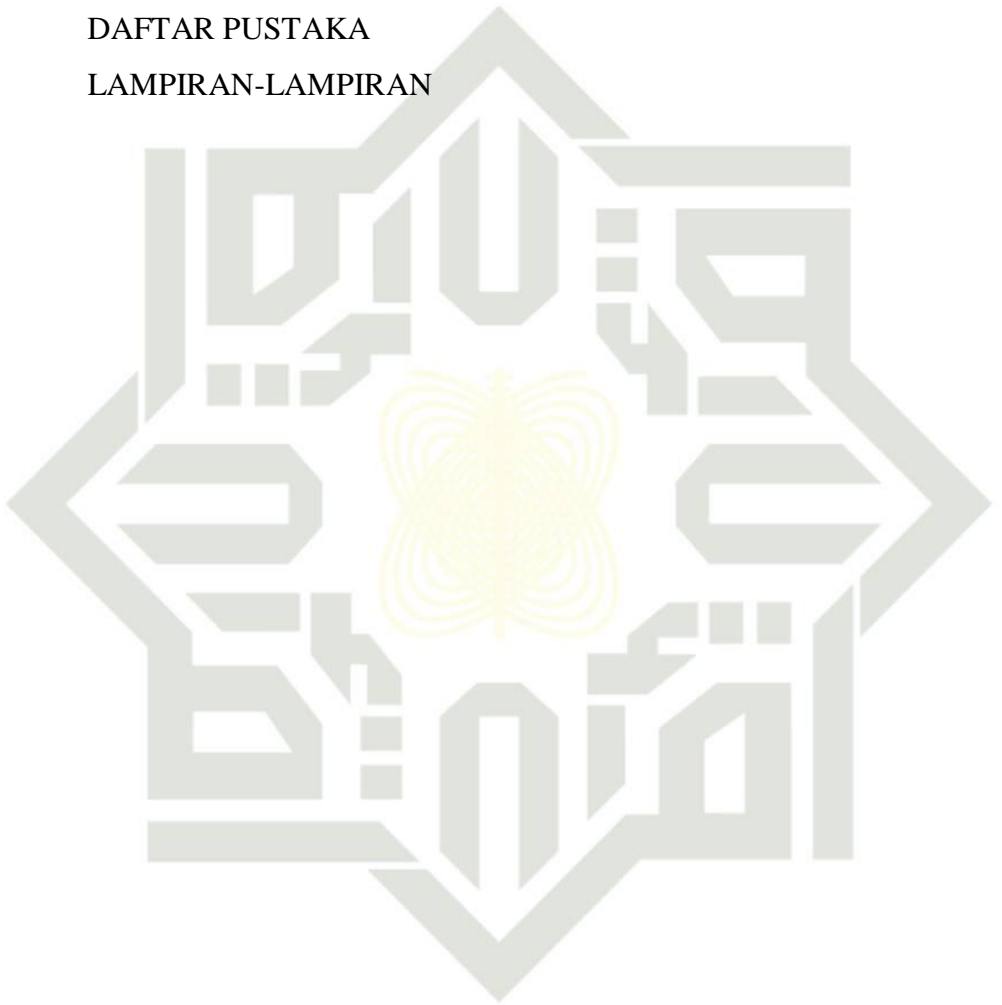
Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB VI :PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut, ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Implementasi

a. Definisi Implementasi

Pada dasarnya implementasi merupakan sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta yang harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya dilapangan, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesia-siaan dari rancangan dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi.

Hanifah Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka menyempurnakan suatu program.³

Sedangkan Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai pelaksanaan yang efektif.⁴

Menurut Wahab implementasi program tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi

³ Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Gravindo Jaya, 2002). hlm. 67

⁴ Seriawan, Guntur, *Implementasi Kebijakan Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2004). hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu program. Dalam implementasi yang dibatalkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. Pemprakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (*the center* atau pusat).
2. Pejabat-pejabat pelaksana dilapangan (*the periphery*).
3. Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan yaitu kelompok-kelompok sasaran.⁵

Menurut Ripley dan Franklin ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk kepada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk *what's happening*” mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Jadi implementasi program tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku unit birokrasi untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan program, tetapi lebih dari itu jaringan sosial politik dan ekonomi yang berpengaruh pada semua pihak yang terlibat dan akhirnya terdapat suatu dampak yang tidak diharapkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

b. Model- Model Implementasi

1. Model Van Metter dan Van Horn

⁵ Wahab, Abdul, *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991). hlm. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model pendekatan *Top-Down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang disebut dengan “*A Model Of The Policy Implementasi*”. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi. Ada 6 (enam) variable menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu:⁶

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika kebijakan tersebut realistis dengan sosiokultur yang ada di level pelaksanaan kebijakan. ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka tidak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Sumber daya lain yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

Ketika SDM yang berkompeten dan *capable* telah tersedia sedangkan anggaran dana tidak tersedia maka akan sulit untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik. Begitu juga saat SDM giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi faktor ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksanaan

⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pusat perhatian pada agen pelaksanaan meliputi organisasi formal maupun organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang dapat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Cakupan atau luasan wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan ketika hendak menentukan agen pelaksanaan karena semakin luas cakupan implementasi kebijakannya maka semakin besar peluang agen yang dilibatkan.

d. Sikap/Kecendrungan (*disposition*) Pelaksanaan

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksanaan sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukan hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang sedang mereka rasakan, tetapi kebijakan yang akan diimplementor atau dilaksanakan adalah kebijakan dari atas “*Top-Down*” yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antara Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka sangat kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

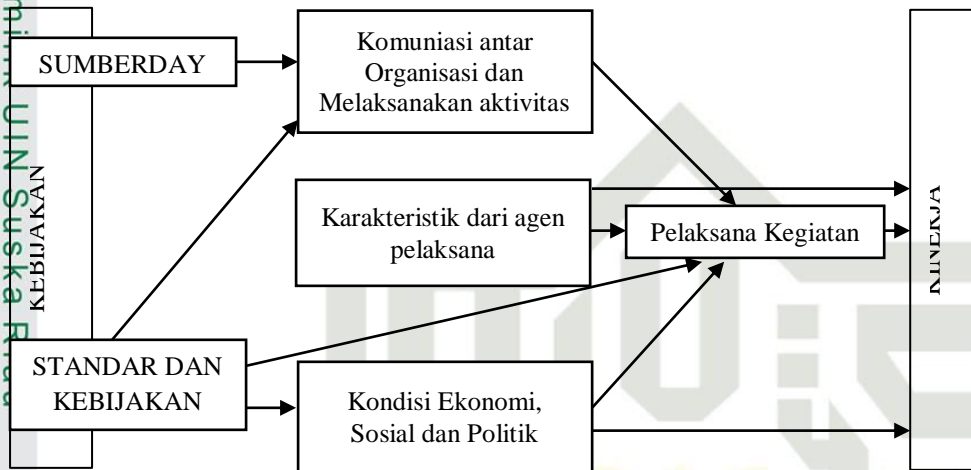
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi faktor kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu upaya untuk mengimplementasikan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.1 Model Donal Van Meter dan Carl Van Horn



2. Model Geogre Charles Edward III

Edward III merupakan model implementasi kebijakan public dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Ada 4 (empat) variable yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu:⁷

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi, informasi yang diperlukan agar para pembuat keputusan atau implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat, terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- 1) *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

⁷ Leo Agustino, *Ibid*, hlm. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- 3) *Konsistensi*, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan.

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) *Staf*, sumberdaya utama dari implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten dibidangnya.
- 2) *Informasi*, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua* informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) *Wewenang*, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- 4) *Fasilitas*, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengenai apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga tidak terjadinya bias. Hal penting yang harus dicermati pada variabel disposisi adalah:

- 1) *Pengangkat birokrat*, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) *Insentif*, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanifulasi insentif. Maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerja sama dari banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka sumber-sumber yang ada juga menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

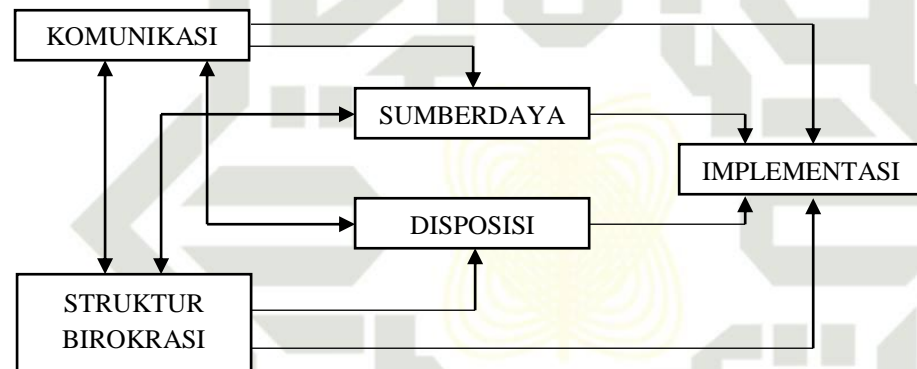
Ada 2 (dua) karakteristik menurut Edwerd III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu dengan melakukan *Standar Operasional Prosedures* (SOPs) dan melaksanakan *Fragmentasi*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Standar Operasional Prosedures* (SOPs), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan bagi para pegawai atau para pelaksana kebijakan, administrator, birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2) *Fragmentasi*, adalah upaya upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai yang ada diantara beberapa unit kerja.

Gambar 2.2 Model *Direct and Indirect Impact On Impementation* (George Edward III)



3. Model Merilee S. Grindle

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “*Implementation Political and Administratif Process*”. Menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan dapat dilihat pada dua hal yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Infek atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- 2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.⁸

Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan public juga sangat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a. *Content of Policy*, meliputi:

- 1) *Interest Affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, karena implementasi kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.
- 2) *Type of Benefits*, yaitu dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan.
- 3) *Exten of Change Evision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas.
- 4) *Site of Decision Making*, yaitu letak pengambilan keputusan atau dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 5) *Program Implementor*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksanaan yang berkompeten dan *capable*.
- 6) *Recources Committed*, yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

b. *Context of Policy*, meliputi:

- 1) *Power, Interest and Strategi of Actor Incolced*, yaitu kekuasaan kepentingan dan strategi dari actor yang terlibat.

⁸ Leo Agustino, *Ibid*, hlm.145



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Institution an Regime Characteristik*, yaitu karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan dimana implementasi kebijakan dijalankan.
- 3) *Compliance and Responsiveness*, yaitu sejumlah tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menggapai implementasi kebijakan yang dikalukan.

Pendekatan *Bottom-up* menurut Grindle yaitu memandang bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat saja, namun berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan persoalan atau permasalahan yang mereka alami.

Pada intinya, pendekatan *Bottom-up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumber daya yang tersedia didaerahnya sehingga kebijakan tersebut tidak kontra produktif dan berhasil dalam implementasi itu sendiri.

Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembanguana. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni: memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Secara luas, tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah:⁹

- 1) Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.

⁹ Edi Suharto, Ph.D, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Remaja Aditama, 2005). hlm. 111



- 3) Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal struktural.
- 4) Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peran-peran sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
- 5) Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

c. Faktor Keberhasilan dan Penghambat Implementasi

Proses implementasi tidak hanya menyangkut badan prilaku administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negatif maupun yang positif.

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan pada implementasi diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana atau penetapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan. Menurut Metter dan Horn merumuskan secara sederhana bahwa faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor dukungan sumber daya, karakteristik, pelaksanaan kebijakan, daya tanggap dan kemampuan untuk menyesuaikan diri.

Menurut Riant Nugroho (2006:179), pada prinsipnya ada empat yang harus dipahami dalam hal keefektifan dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat

Ketepatan kebijakan dinilai dari sisi. *Pertama*, sejauh mana kebijakan yang telah ada memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. *Kedua*, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai katakter masalah yang hendak dipecahkan mengenai perumusan kebijakan. *Ketiga*, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang (misi kelembagaan) yang sesuai karakter kebijakannya.

2. Tepat pelaksanaanya

Aktor implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah, namun masih ada yang harus ikut serta berperan yaitu masyarakat dan swasta.

3. Tepat target

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, yaitu: *Pertama*, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. *Kedua*, apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. *Ketiga*, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya yang tampak baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang tidak efektif dengan kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Lingkungan kebijakan yaitu lingkungan intraksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari publik opini yaitu persepsi publik dalam implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan, interpretive, intuition, yang berkenaan dengan interpretasi dan lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekanan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

2. Permukiman Kumuh

Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu area atau wilayah beserta prasarana yang ada didalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang luas. Penataan permukiman dapat dibedakan menjadi dua objek penataan, yaitu penataan permukiman lama dan penataan permukiman baru. Penataan permukiman lama dilakukan terhadap objek yang sudah terbangun, sedangkan penataan permukiman baru dilakukan terhadap objek yang akan dibangun.¹⁰

Permasalahan utama pada permukiman lama yang perlu ditata adalah adanya permukiman kumuh. Permukiman kumuh menunjukkan keadaan permukiman padat yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana yang memadai, terutama jalan dan pembuangan air limbah. Permukiman merupakan sebuah kawasan dimana sekelompok orang membangun dan bertempat tinggal di kawasan tersebut. Adanya permukiman mencerminkan bagaimana sekelompok masyarakat menjalani interaksi dengan kelompok sosial lainnya dan lingkungannya.

Sebagai suatu lokasi permukiman manusia, kota tidak lepas dari berbagai masalah yang ada, baik masalah manusia yang berdiam di dalamnya, masalah yang timbul dari keadaan fisik kota itu, maupun keadaan atau lokasi kota itu. permasalahan kota-kota di dunia telah diringkas sebagai berikut:¹¹ (1) masalah pencemaran dan sampah; (2)

¹⁰ Komarudin, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, (Jakarta: Rakasindo, 1997). hlm. 43

¹¹ Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm, 853



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pengangkutan dalam kota; (3) masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat; (4) masalah permukiman yang tidak memenuhi persyaratan untuk hidup; dan (5) masalah kemasyarakatan yang timbul dikalangan penduduknya (pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan hubungan antar kelompok etnis.

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang dihuni oleh orang miskin, penduduk yang padat, serta dengan sarana dan prasarana yang minim. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh, diantaranya urbanisasi, sarana prasarana, ekonomi, lahan perkotaan, tata ruang, sosial budaya, status kepemilikan bangunan dan lama ditinggal penghuni.

Permukiman kumuh adalah permukiman rumah dan kondisi hunian masyarakat dimana rumah maupun sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka serta kelengkapan fasilitas lainnya.¹²

Kumuh merupakan permukiman atau perumahan orang-orang miskin yang berpenduduk padat, yang terdapat dipinggir jalan atau lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota. Secara keseluruhan juga bisa disebut wilayah percomberan. Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

a. Arah kebijakan dan strategi penanganana kumuh

1. Arah kebijakan

¹² Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), LKM Tunas Rias Mandiri Kearah Rintis (2016-2021). hlm.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan (*enabling environment*).
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh.
- c. Mencegah pembentukan kumuh baru.
2. Strategi pokok
 - a. Menyediakan lahan perumahan untuk MBR.
 - b. Fasilitas pembangunan perumahan swadaya.
 - c. Menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan rencana kota.
 - d. Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR.
 - e. Menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan system kota.
- b. Komponen penanganan permukiman kumuh
 1. Rusanawa
 2. Air dan sanitasi
 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
 4. Pembangunan sosial budaya masyarakat

Permukiman kumuh menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman diantaranya:

- a. Perumahan kumuh adalah yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- b. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang karakteristik kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut:¹³

- a. Merupakan suatu perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas.

¹³ Surat Edaran Kementerian PUPR No. 02/PRT/M/2016, diakses pada tanggal 01 Desember 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kondisi bangunan yang mengalami kepadatan, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat
- c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu:
 - 1) Peningkatan aksesibilitas jalan lingkungan
 - 2) Peningkatan aksesibilitas drainase lingkungan
 - 3) Peningkatan pelayanan air bersih
 - 4) Peningkatan pelayanan air limbah
 - 5) Peningkatan pelayanan persampahan

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya, baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri maupun ekosistem kota. Oleh karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang harus mendapatkan perhatian serius adalah: permasalahan ekonomi dan permasalahan lingkungan.

Sadyohutomo menyatakan bahwa faktor penyebab munculnya permukiman kumuh yaitu sebagai berikut.¹⁴

1. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang cukup. Pertumbuhan penduduk kota terdiri dari dua sumber. Pertama, karena migrasi masuk, migrasi desa-kota di Negara berkembang berlangsung dengan tingkat yang cukup tinggi dan dengan tingkat keahlian sumber daya manusia yang rendah, dikarenakan tingkat keahliannya rendah dan tingkat upah rendah.
2. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi berarti pertumbuhan alami penduduk di kota juga masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk diperkotaan, terutama yang berasal dari migrasi

¹⁴ Sadyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). hlm 28



masuk merupakan penduduk pada usia subur, pertumbuhan penduduk alami menimbulkan peningkatan kepadatan hunian rumah dan kepadatan bangunan rumah.

3. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah-mecah bidang tanah dan membangun permukiman mereka tanpa didasari perencanaan yang tepat dan memadai.

3. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program menurut Arikunto menyatakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang direncanakan dan memiliki tujuan tertentu sehingga pencapaian keberhasilan tersebut juga dapat diukur. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan kumpulan dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mengarahkan kepada suatu tujuan tertentu dan dapat dinilai tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dalam bentuk program tersebut.

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kegiatan atau program yang dilaksanakan untuk menargetkan 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh, 100% sanitasi layak yang lebih dikenal dengan 100-0-100. Target yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah kota, masyarakat swasta dan kelompok peduli lainnya. Salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang nasional adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan saran dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permukiman kumuh.¹⁵ “Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang akan dicapai melalui program KOTAKU. KOTAKU diterjemahkan kedalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut merupakan perencanaan Makro (*top-down*) dengan perencanaan Mikro (*bottom-up*). Program KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru dengan kegiatan-kegiatan pada Desa/Kelurahan, serta kawasan Kabupaten/Kota. kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi permukiman kumuh.

Tahap pelaksanaan program KOTAKU adalah pendekatan dengan Lembaga masyarakat Desa/Kelurahan seperti, Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Kemudian melakukan pendataan kondisi awal dengan indikator kumuh yang ada di Desa/Kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan dengan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada kawasan perkotaan.

Pelaksanaan pembangunan perkotaan yang baik memerlukan sebuah pelaksanaan perancangan kota yang baik. Hal tersebut tersebut tidak selalu diakui karena secara politis sering dianggap bahwa pelaksanaan perencanaan kota sudah cukup. Memang di dalam pelaksanaan tersebut dibutuhkan perencanaan kota secara baik, tetapi pelaksanaan proses tersebut yang bersifat abstrak sangat perlu didampingi oleh perencanaan yang memperhatikan kota secara fisik, yaitu bagaimana kota berkembang didalam ruang tiga dimensi dan bagaimana prosesnya

¹⁵ Laporan Kinerja Direktur Jendral Cipta Karya Tahun 2015. hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta apa dan siapa yang terlibat secara konkret didalam proses pembangunan tersebut. Agar pelaksanaan pembangunan kota berlangsung secara efektif.¹⁶

Monitoring dan *evaluasi* akan dilaksanakan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersamaan tahap kegiatan, termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1. Pemetintah daerah sebagai nahkoda
Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor ditingkat pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program)

¹⁶ Muhammad Soim, M.A., Drs. Achmad Ghozali Assyafi'i, M.Si, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). hlm. 218



Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan tercapainya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional.

3. Singkronisasi perencanaan dan penganggaran
Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh ditingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran melalui dari Pemerintah Provinsi, Pemkat/Pemkot hingga pemerintah Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
4. Partisipatif
Pembangunan partisipatif dengan mendukung perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.
5. Kreatif dan Inovatif
Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman layak huni.
6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

7. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*). Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan menerapkan tata kelola yang baik.
8. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Siklus pembangunan yang dilakukan oleh KOTAKU ada 2 yaitu pemberdayaan sebagai penguatan dan pemberdayaan sebagai proses. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan kepada masyarakat.¹⁷ Keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam pembangunan keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu pemberdayaan dapat disimpulkan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah.

Istilah pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosial dan lain-lain. Oleh karena itu Worldbank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada sekelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian (*coice*) suatu (konsep,

¹⁷ Totok Mardikanto, Purwokoto Soebiyato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2003). hlm. 26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode, produk, tindakan, dan lain-lain), yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat. Dalam kata lain pemberdayaan merupakan suatu proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Sejalan dengan itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan), untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.¹⁸

B. Peneliti Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka kajian terdahulu yang telah diteliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anton Alpinato di UIN SUSKA RIAU, tahun 2015 dengan judul “Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Produktifitas Masyarakat di Desa Pelanduk Parit Teluk Telentang Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir”. Dalam penelitian Anton Alpianto fokus hubungan sanitasi dengan Produktifitas Masyarakat di Desa Pelanduk Parit Teluk Telentang Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menggunakan metode Kuantitatif, sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode kualitatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rusnia di UIN SUSKA RIAU, tahun 2017 dengan judul “Implementasi Program Penataan Lingkungan Permukiman Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru” dengan metode kualitatif, sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan Dewi Zulyanti, tahun 2017, tentang Implementasi Program KOTAKU Berbasis Masyarakat di Kelurahan Negri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa peran KOTAKU melalui 4 tahap utama yaitu: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dan tahap-tahap ini masyarakat terlibat dalam proses peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode kualitatif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Umi Pratiwi tahun 2019, tentang peran fasilitator dalam penanganan kawasan kumuh Program KOTAKU di RW 02 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Metoda yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian disimpulkan bahwa fasilitator program kurang berperan dalam meningkatkan kualitas kumuh dengan salah satu kendala kurang terlibatnya masyarakat dalam proses program perencanaan program, sedangkan penelitian penulis tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan metode kualitatif.

C Kerangka Pemikiran

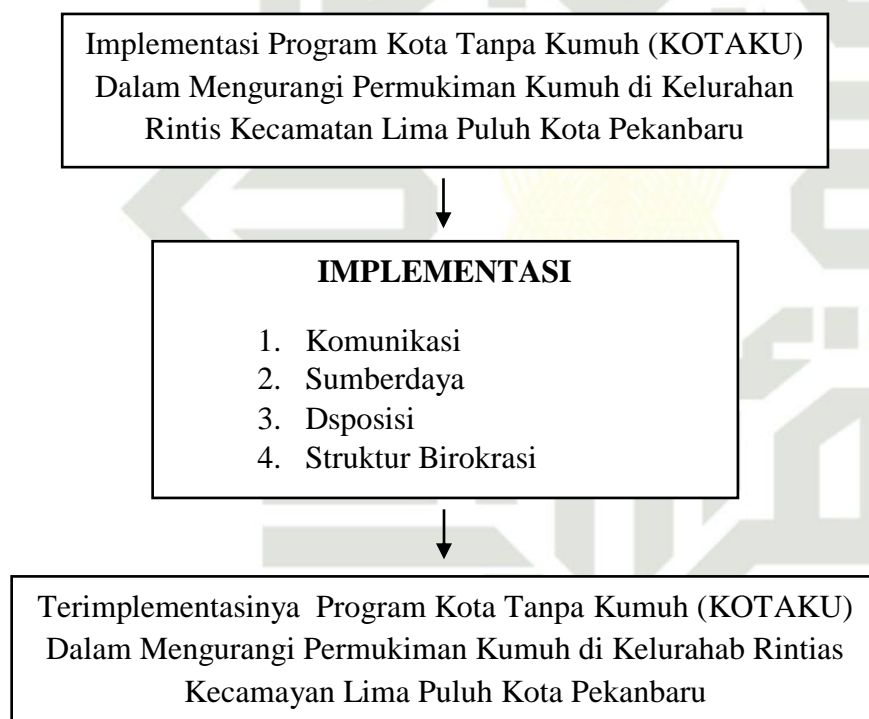
Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan dijabarkan dalam bentuk nyata, karena teori masih bersifat abstrak dan sepenuhnya masih belum dapat diukur dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan kerangka pikir keberhasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dengan indikator Peningkatan pelayanan Persampahan, Jalan Lingkungan, Drainase, Penyediaan Air Bersih, Pengelolaan Air Limbah, dan Ruang Terbuka Hijau dengan menggunakan teori Geogre Charles Edward III, ada 4 (empat) variabel yang menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Lebih rinci sebagai berikut.

Gambar.2.3
Kerangka Pikir





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Jusuf adalah salah satu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana sistematis atau prinsip-prinsip mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.¹⁹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang menggambarkan dan menjabarkan temuan lapangan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah “Prosedur” yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁰ Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif untuk menganalisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Dengan penelitian dapat dilakukan dengan pengamatan yang lebih mendalam dan teliti terhadap objek penelitian sehingga yang didapatkan lebih akurat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. Penelitian ini akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal dan mendapatkan surat izin riset.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: data primer dan data sekunder, sumber data primer diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan lokasi penelitian (lapangan) melalui pengamatan Langsung dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang dianggap perlu dan berguna dalam penelitian ini.

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 12

²⁰ Lexi. J Moe Leong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Tekni informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive, yang mana teknik ini ialah teknik yang digunakan oleh peneliti jika melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.²¹

Informan dalam penelitian ini terdiri 6 orang dari dua kategori yakni 1 orang informan kunci dan 5 orang informan pendukung. Adapun informan kunci dan informan pendukung adalah sebagai berikut:

1. Ketua Koordinator Kota Pekanbaru (informan kunci)
2. Fasilitator Kelurahan (informan pendukung)
3. Ketua kelompok swadaya masyarakat, KSM Rintis (informan pendukung)
4. Ketua RW 01, RW 02, RW 03 (informan pendukung)

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan:

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.²² Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi terus terang atau observasi secara terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

²¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm 96

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative.²³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses memperoleh data penelitian dalam bentuk arsip, surat-surat, catatan harian dan lain sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Yang dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari KOTAKU yang berkaitan dengan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, baik berupa foto kegiatan arsip dan lain sebagainya.

F. Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang telah digali, digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verifikasi diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Teknik untuk memeriksa atau mengukur tingkat kredibilitas penelitian ini maka peneliti menggunakan:

1. Ketekunan pengamatan, yaitu memusatkan diri pada persoalan yang dibahas dalam penelitian. Ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk memahami dan mendapatkan data secara mendalam, disamping memang dilakukan untuk mengatasi minimnya waktu penelitian ini. Ini terutama dilakukan karena peneliti sudah sejak awal mengarahkan fokusnya, sehingga mudah untuk menghindari keberadaan subjek apakah berdusta, atau berpura-pura.
2. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

²³ *Ibid*, hlm 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan perbandingan terhadap data itu. Pada dasarnya peneliti melakukan triangulasi ini dengan melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh dilapangan, baik dengan cara membandingkan (misalnya data hasil pengamatan dengan hasil wawancara), membandingkan apa yang telah dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan seterusnya. Semakin banyak informan tentu semakin banyak pula informasi yang peneliti peroleh.²⁴

G Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yaitu menggambarkan dan memaparkan fenomena-fenomena yang ada dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁵

Adapun menurut Milles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahap dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

2. Paparan Data (Data Display)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing /verifying).

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil analisis data.²⁶

²⁴ Burhan Bunging, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 192

²⁵ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hlm. 239

²⁶ Imam Gunawan, *Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). hlm. 211



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Program KOTAKU

Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang akan dicapai melalui Program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa. Program KOTAKU diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman permukiman kumuh perkotaan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (top-down) dengan perencanaan mikro (bottom-up). Pemerintah kabupaten/kota memimpin keseluruhan proses kegiatan penanganan tersebut. Di tingkat kelurahan/desa, masyarakat bekerja bersama dengan pemerintahan kelurahan/desa dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh di wilayahnya. Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan beragam sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayahnya. Sebagai satu kesatuan sub-sistem wilayah kabupaten/kota, maka pemerintah kelurahan/desa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Kerja Pembangunan (RPJM/RKP) Desa atau Rencana Strategis/Rencana Kerja (Renstra/Renja) Kecamatan yang dilengkapi dengan perencanaan rinci dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman dengan kedalaman



Rencana Teknis. Perencanaan di tingkat kelurahan/desa tersebut tentunya harus terkoneksi dengan sistem perencanaan penanganan permukiman kumuh kab/kota dan selaras dengan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota.

Di bawah ini diuraikan prinsip-prinsip penataan permukiman di tingkat kelurahan/desa:

- a. RPLP sebagai instrumen kolaborasi yaitu instrumen perencanaan tingkat kelurahan yang tersusun melalui proses kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan maupun kota, serta disepakati dalam forum kolaborasi di tingkat kelurahan. RPLP memberikan ruang untuk para pemangku kepentingan bersama-sama menyusun rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh maupun pencegahan kumuh baru untuk periode lima tahun.
- b. Berorientasi pada pembangunan manusia dan aktifitasnya Penataan permukiman mengakomodasi pembangunan manusia atau masyarakat penghuninya dan kegiatan yang ditimbulkan dalam bermukim. Kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan/infrastruktur (SEL) dalam penataan lingkungan permukiman harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat penghuninya.
- c. Penataan permukiman berbasis komunitas Masyarakat kelurahan/desa merupakan salah satu pelaku utama pembangunan tingkat kelurahan/desa. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk seluruh proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penataan lingkungan permukimannya, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, operasi & pemeliharaan, serta keberlanjutan program. Masyarakat diikutsertakan untuk berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintahan kelurahan/desa, antar pemerintah kelurahan/desa dibawah koordinasi pemerintah kecamatan dan kelompok peduli dalam penataan lingkungan permukimannya. Masyarakat bukan hanya berperan di kawasan prioritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan tingkat kelurahan/desa, namun juga berperan di tingkat kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan/desa harus dikaitkan dengan kepentingan penataan permukiman antar kelurahan/desa dibawah koordinasi pemerintah kecamatan dan kepentingan di tingkat kabupaten/kota secara menyeluruh dan terpadu.

d. Penataan permukiman kelurahan atau desa merupakan urusan bersama Permukiman kelurahan atau desa merupakan bagian dan pembentuk wajah permukiman kabupaten/kota. Pemerintah Pusat Pemerintah daerah, kecamatan kelurahan/desa, BKM/LKM, kelompok peduli, serta masyarakat harus aktif berpartisipasi dan bekerja bersama dalam kegiatan penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa tersebut, utamanya penanganan permukiman kumuh. Demikian pula sebaliknya, penataan permukiman tingkat kelurahan/desa atau antar kelurahan/desa merupakan bagian dari penataan permukiman tingkat kabupaten/kota. Seluruh proses kegiatan penataan permukiman yang melibatkan pelaku tingkat kelurahan/desa perlu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dari sekedar kelurahan/desanya, yaitu kepentingan wilayah sekitar (antar kelurahan/desa dibawah koordinasi kecamatan) termasuk kepentingan kota/kabupaten.

e. RPLP terkonsolidasi dengan RP2KPKP RPLP disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi/keterpaduan dengan RP2KPKP, rencana sektoral, maupun rencana tingkat kota lainnya yang disusun dalam rangka peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh baru. Keterpaduan RPLP dengan RP2KPKP antara lain terefleksikan dalam keterpaduan data, peta, scenario perencanaan, konsep pengembangan, maupun program-program dalam rencana aksinya.

f. Sinergi program dalam penataan permukiman Kelurahan/Desa Program-program sektoral dalam penataan permukiman di wilayah kelurahan/desa yang telah disepakati di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa perlu dilakukan upaya sinkronisasi/keterpaduan program dalam rangka peningkatan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permukiman dan pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh baru. Dokumen perencanaan RPLP dengan kedalaman rencana teknis yang telah menjadi satu kesatuan dengan RPJM & RKP Desa dan Renstra kecamatan, didayagunakan sebagai media sinkronisasi/keterpaduan program sektoral tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

Berkeadilan dan berpihak pada yang terabaikan/terpinggirkan Penataan Permukiman untuk seluruh wilayah kelurahan/desa. Prioritas penanganan permukiman kumuh dilakukan sebagai bagian dalam penataan permukiman. Prioritas dilakukan dengan memperhatikan prinsip berkeadilan, berpihak pada yang terabaikan/terpinggirkan (marginal), serta memperhatikan kelompok rentan/disabilitas. Misalnya saat seleksi dan penentuan lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh dilakukan berdasarkan kriteria kebutuhan dan bukan prinsip pemerataan dengan bagi rata program. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, anak dan pemuda harus dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan penataan Permukiman, terutama mereka yang tinggal di Permukiman kumuh.

h. Bijaksana memanfaatkan sumber daya yang memperhatikan masa depan Penataan lingkungan permukiman bukan hanya untuk menjawab persoalan yang ada saat ini (problem solving), namun juga untuk merencanakan agar masa depan lingkungan permukiman layak huni secara berkelanjutan (visioner). Beragam sumber daya perlu baik yang ada saat ini maupun di masa yang datang perlu dikelola secara bijaksana dengan terus menumbuhkan iklim kreatifitas agar tumbuh beragam inovasi dalam penataan permukiman yang layak huni tersebut.

Optimalisasi swadaya masyarakat dan relawan Masyarakat berhak dan bertanggung jawab berpartisipasi dalam penataan permukimannya. Rasa memiliki terhadap permukimannya perlu terus dibangun secara menerus agar dapat menggalang swadaya dan relawan masyarakat. Membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



dari dalam masyarakat dikedepankan dalam seluruh proses kegiatan program KOTAKU.

Ketentuan penyelenggaraan yang telah diatur dalam pedoman umum KOTAKU, yang harus diterapkan diantaranya:

- a. Adanya komitmen pemerintahan kelurahan/desa/kecamatan, masyarakat, dan BKM/LKM untuk mensinergikan program dan kegiatan prioritas penanganan permukiman kumuh dalam RPJM/RKP Desa, Renstra/Renja Kecamatan dan dengan perencanaan tingkat kabupaten/kota.
- b. Kelembagaan BKM/LKM yang berfungsi dengan baik.
- c. Pemerintah kelurahan/desa bersama BKM/LKM memfungsikan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) yang sudah ada atau membentuk TIPP baru untuk memfasilitasi perencanaan penanganan permukiman kumuh di bawah koordinasi Pokja PKP kabupaten/kota.
- d. Perencanaan berorientasi pada pencapaian visi (dengan segala kendala dan potensi yang dimiliki), bukan hanya pemecahan masalah penanganan permukiman kumuh yang ada saat ini.
- e. Bagi kelurahan/desa yang termasuk dalam kategori kumuh, kegiatan penanganan permukiman kumuh harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah, seperti peningkatan kualitas pelayanan lingkungan, sarana dan prasarana serta kebutuhan untuk penghidupan yang berkelanjutan.
- f. Melibatkan masyarakat lokasi sasaran sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan/pengelolaan dan pemeliharaan.
- g. Sinkronisasi/Keterpaduan RPLP dengan rencana di tingkat kelurahan maupun rencana di tingkat kota yang disusun dalam rangka peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan munculnya kawasan permukiman kumuh baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sejarah Singkat Kelurahan Rintis

Sejarah Nama Kelurahan Rintis diberikan sejak Pada Zaman Jepang tepatnya pada tahun 1940 dimana pada zaman tersebut terkenal dengan pekerja Romusa. (Kerja Paksa pada zaman pendudukan Jepang), Pekerja-pekerja Romusa ini dipekerjakan dengan paksa oleh penjajah Jepang untuk membuka dengan merintis hutan guna membuat rel-rel kereta api sebagai sarana transportasi pada masa itu. Sejak saat itu daerah yang dibuka tersebut diberi nama kampung Rintis dan dalam perkembangannya sekarang ini telah menjadi Kelurahan Rintis. (sumber data Abdul Muthalib Tokoh Masyarakat Rintis).

Kelurahan Rintis merupakan bagian dan termasuk di dalam wilayah Kecamatan Limapuluh, yang mana Kecamatan Limapuluh tersebut terdiri dari empat Kelurahan yaitu Kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, Kelurahan Tanjung Rhu dan Kelurahan Pesisir,.

Kelurahan Rintis terletak di Jl, Sultan Syarif Qasim No. 128 dan Luas Wilayah Kelurahan Rintis 6,8 KM², Adapun Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pesisir, Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota tinggi sedangkan Timur berbatasan dengan Kelurahan Sekip, dan Barat dengan Senapelan. Adapun.

1. Visi Misi Kelurahan Rintis

Visi Kelurahan Rintis : MENJADIKAN KELURAHAN RINTIS SEBAGAI PUSAT KEGIATAN PEREKONOMIAN RAKYAT, PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA MENUJU KELURAHAN RINTIS YANG SEJAHTERA YANG BERNUANSAKAN AGAMIS.

Misi Kelurahan Rintis :

- a. Memberikan Pelayanan Secara Baik Dan Tepat Waktu
 - b. Memberikan Informasi Dan Komunikasi Secara Transparan.
 - c. Menciptakan Hubungan Yang Harmonis Antar Agama, Suku Dan Etnis.
 - d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
- ### 2. Letak dan Geografis Kelurahan Rintis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas Wilayah, Luas wilayah dan Jarak ke Pusat Pemerintahan dan Objek Vital Lainnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kelurahan Rintis

NO	BATAS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Utara	Pesisir	Limapuluh
2	Selatan	Kota Tinggi	Pekanbaru Kota
3	Timur	Sekip	Limapuluh
4	Barat	Senapelan	Senapelan

Tabel 4.2
Luas Wilayah Kelurahan Rintis Menurut Jenis Penggunaan

NO	JENIS PENGGUNAAN TANAH	LUAS
1	Bangunan dan Pekarangan	53,00
2	Tanah Kering	7,00
3	Lainnya	8,00
Jumlah		68,00

Tabel 4.3
Jarak Kepusat Pemerintahan

NO	NAMA TEMPAT	KM
1	Kantor Kecamatan limapuluh	0,3
2	Kantor Walikota Pekanbaru	2,3
3	Kantor Gubernur Propinsi Riau	2,0

Tabel 4.4
Jarak Ke Objek-Objek Vital

NO	NAMA TEMPAT	KM
1	Sungai Siak	0,5
2	Hutan Kota	1,5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Pasar Pusat	1,0
4	Bandahara SSK II	5,0
5	Terminal Akap	6,0
6	Pelabuhan Sungai Duku	2,5

struktur Pemerintahan Kelurahan Rintis

Kelurahan merupakan unit terkecil dari system Pemerintahan di Negara kita, yang mana dalam hal ini Kelurahan Rintis di Pimpin Oleh Seorang Lurah yang merupakan Pejabat Pemerintah. Didalam Menjalankan Tugas-tugas Pemerintahan pada tingkat Kelurahan, Lurah dibantu Oleh Pegawai Kelurahan dan pada Tingkat Kemasyarakatan Lurah dibantu oleh Ketua RW dan Ketua RT yang langsung dipilih Oleh Masyarakat.

Tabel 4.5
Struktur Pemerintahan Kelurahan Rintis

NO	APARAT PEMERINTAHAN	JUMLAH
1	Lurah	1
2	Sekretaris Lurah	1
3	Pegawai Kelurahan	4
4	THL	2
5	Rukun Warga	8
6	Rukun Tetangga	29

4. Kependudukan

Kependudukan di Kelurahan Rintis dapat dilihat dari beberapa Aspek yaitu, jumlah penduduk menurut tingkat kepadatan penduduk, jenis Kelamin, Kelompok Umur, Status Pendidikan, Kewarganegaraan, Rumah Tangga dan Rata-rat Jiwa, Kelahiran dan kematian, menurut yang datang dan pindah, menurut suku bangsa, jenis pendidikan, status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan dan lapangan pekerjaan, hal ini dapat di lihat pada Table berikut ini.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Menurut tingkat Kepadatan Tahun 2019

NO	TINGKAT KEPADATAN	JUMLAH
1	Luas Wilayah	0,68 (KM2)
2	Luas Bangunan	192 M2
3	Jumlah Penduduk	8.249 Jiwa

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

NO	JENIS KELAMIN	PENDUDUK
1	Laki – Laki	4.144 Jiwa
2	Perempuan	4.105 Jiwa
Total		8.249 Jiwa

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

NO	KELOMPOK UMUR	PENDUDUK
1	0 – 4 Tahun	736 Jiwa
2	5 Tahun	194 Jiwa
3	6 Tahun	137 Jiwa
4	7 – 12 Tahun	723 Jiwa
5	13 -15 Tahun	417 Jiwa
6	16 Tahun	184 Jiwa
7	17 Tahun	235 Jiwa
8	18 Tahun	141 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	19 – 24 Tahun	1.176 Jiwa
10	24 Tahun Keatas	4.306 Jiwa
Total		8.249 Jiwa

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Menurut Status Kewarganegaraan Tahun 2019

NO	STATUS KEWARGANEGARAAN	PENDUDUK
1	Warga Negara Indonesia	8.249 Jiwa
2	Warga Negara Asing	0 Jiwa
Total		8.249 Jiwa

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk
Menurut Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga Tahun 2019

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk	8.249 Jiwa
2	Jumlah Rumah Tangga	1.439 Rumah Tangga
3	Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga	4 Jiwa

4.11
Jumlah Penduduk
Menurut Tingkat Kelahiran dan Kematian Tahun 2019

NO	KETERANGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kelahiran	54	43	97
2	Kematian	26	27	53
Total				150

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa Tahun 2019

NO	SUKU BANGSA	JUMLAH/JIWA
----	-------------	-------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Melayu	1.915
2	Jawa	1.465
3	Minang	2.246
4	Batak	552
5	Sunda	151
6	Banjar	14
7	Bugis	11
8	Flores	8
9	Lainnya (China)	1.887
10	WNA	-
Total		8.249 Jiwa

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan

NO	STATUS PEKERJAAN	JUMLAH/JIWA
1	Bekerja	1.232
2	Mencari Pekerjaan	256
3	Sekolah	5901
4	Lainnya	860
TOTAL		8.249

Tabel 4.14
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH/JIWA
1	Perkebunan	52
2	Industri Pengolahan	159
3	Perdagangan	2.619

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Jasa	1.238
5	Angkutan	169
6	Lainnya	728

5. Pendidikan

Sektor Pendidikan merupakan jembatan menuju masyarakat yang sejahtera, dengan pendidikan yang cukup dan memadai nantinya akan berpengaruh tingkat perekonomian dari masyarakat. Di antara Kelurahan yang ada di Kecamatan limapuluh, Kelurahan Rintis merupakan Sentra Pendidikan ini terbukti dengan adanya berbagai sarana pendidikan dan Jumlah Tenaga Pendidik dan anak yang Berkolah, hal ini dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Tabel 4.16
Jumlah Sekolah yang ada di Kelurahan Rintis

NO	JENIS PENDIDIKAN	SEKOLAH
1	Taman Kanak-Kanak	3
2	Sekolah Dasar	5
3	SLTP	5
4	SMU	2
5	SMK Kejuruan	1
TOTAL		16

6. Agama

Masyarakat yang ada di Kelurahan Rintis, merupakan Masyarakat yang majemuk dan agamis, ini dapat dilihat dari adanya berbagai agama dan rumah-rumah ibadah yang ada di Kelurahan Rintis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.17
Pemeluk Agama yang ada di Kelurahan Rintis

NO	PEMELUK AGAMA	JUMLAH/JIWA
1	Islam	5.858
2	Katolik	251
3	Protestan	522
4	Hindu	4
5	Budha	1.614
TOTAL		
Tempat Ibadah		
NO	Jumlah	
1	Lainnya	-
1	Mesjid	8.249
2	Mushalla	5
TOTAL		10

Tempat Ibadah Yang ada Di Kelurahan Rintis

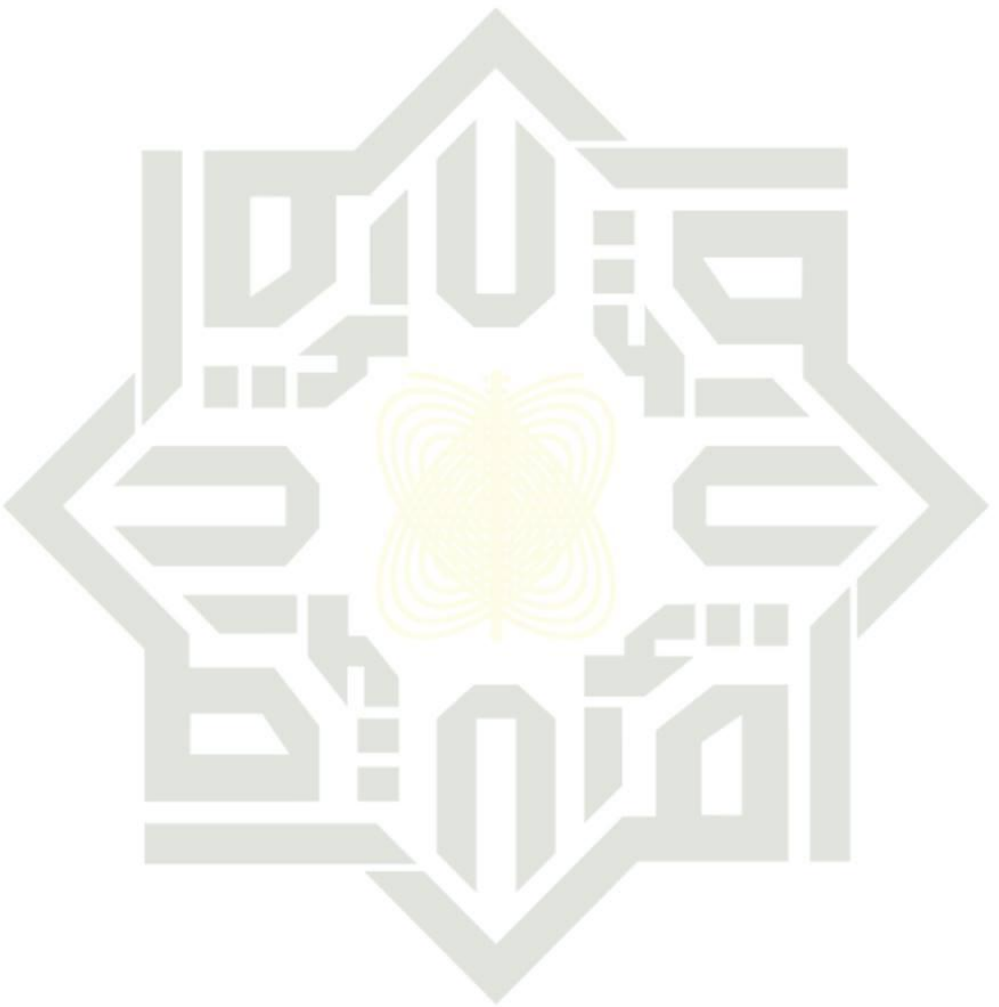
7. Kesehatan

Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ini artinya bahwa satingkat individu-individu sedapatnya menjaga kesehatan, Dalam konteks ini Kelurahan Rintis selalu mendukung dan memacu untuk memasyarakatkan Kesehatan yang ada di Kelurahan Rintis,. Adapun Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Peserta Keluarga berencana Penggunaan Sumber Air dan Penggunaan Jamban yang ada di Kelurahan Rintis dapat dilihat pada Table Berikut:

Tabel 4.19
Sarana Kesehatan di Kelurahan Rintis

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	Politehnik	1
2	Puskesmas Pembantu	1
3	Rumah Sakit Bersalin	2

4	Praktek Dokter	12
5	Pos KB	1



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, peneliti dapat menarik kesimpulan dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Program Kotaku Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diimplementasikan di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru pada tahun 2019, bahwa pelaksanaan Program KOTAKU telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan program yang telah di persiapkan seperti pembuatan jalan lingkungan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan dan ruang terbuka hijau. Namun terdapat program yang tidak berjalan dengan baik seperti penyediaan tempat sampah yang tidak memadai. namun komunikasi antara fasilitator KOTAKU dengan masyarakat terjalin dengan baik, baik itu dari kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, sumberdaya yang memadai serta dukungan dari masyarakat dalam pengimplementasian program KOTAKU dan struktur birokrasi yang sesuai dengan acuan yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

1. Diharapkan selalu membangun kolaborasi yang baik antara Tim Fasilitator Kelurahan dengan pihak kelurahan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) serta masyarakat ikut berpartisipasi dengan untuk sama-sama membangun kawasan yang bersih dan bebas dari kumuh.

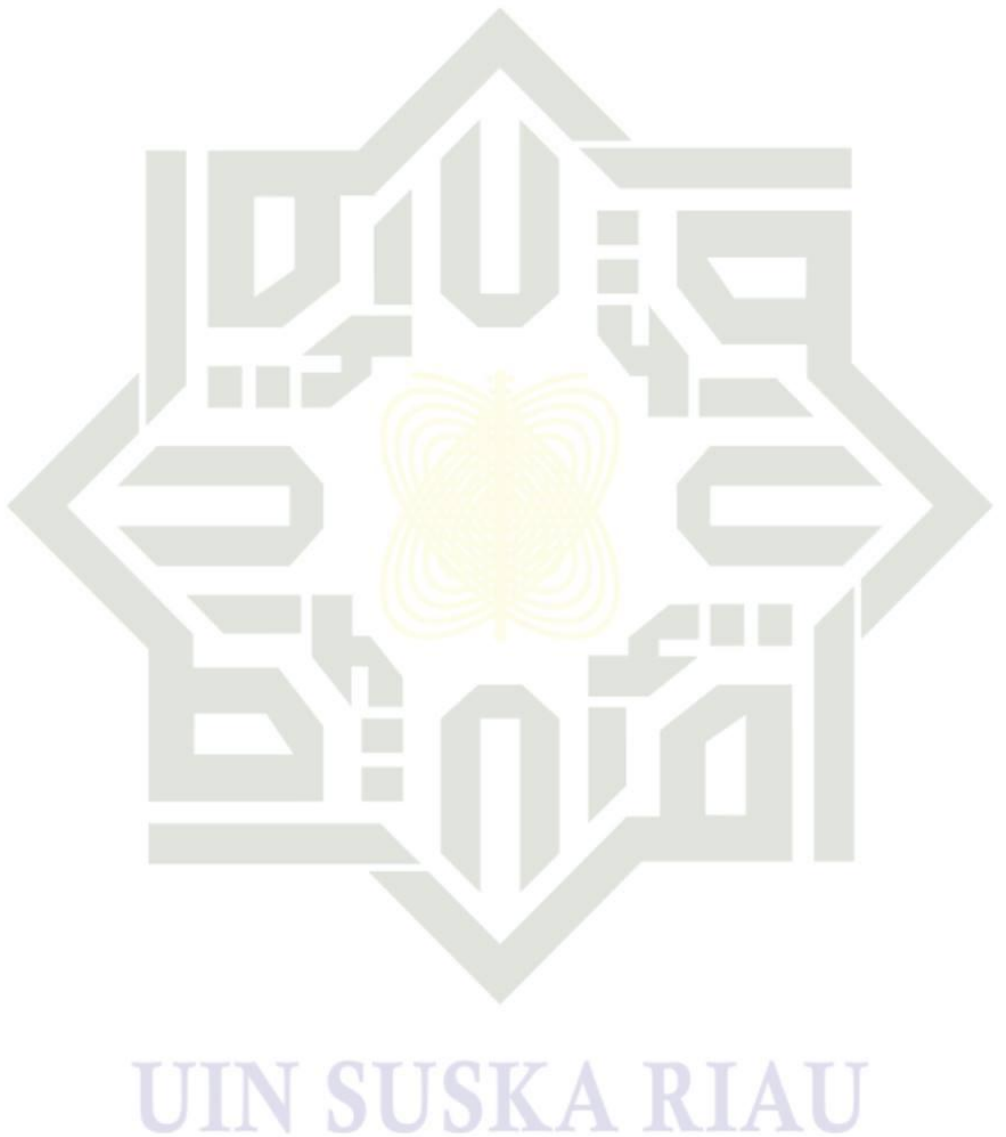
2. Diharapkan adanya evaluasi program yang sudah terlaksana untuk peningkatan program kedepannya sehingga program-program yang terlaksana mampu terealisasi dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Burhan Bungin, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana
- Burhan Bungin, 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana
- Edi Suharto, Ph.D, 2005. *Membanguna Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Kencana
- Harrison, Hanifah, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Gravindo Jaya
- Inam Gunawan, 2013. *Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara
- Jusuf Soewadji, 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Komarudin, 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Rakasindo
- Laporan Kinerja Direktorat Jendral Cipta Karya Tahun 2015
- Leo Agustino, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Lexi. J Meo Leong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mhammad Idrus, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mhammad Soim, M.A., Drs. Achmad Ghozali Assyafi'i, M.Si, 2018. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), 2016-2021. LKM Tunas Rias Mandiri Kelurahan Rintis
- Sedyohutomo, 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi Kebijakan Dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya

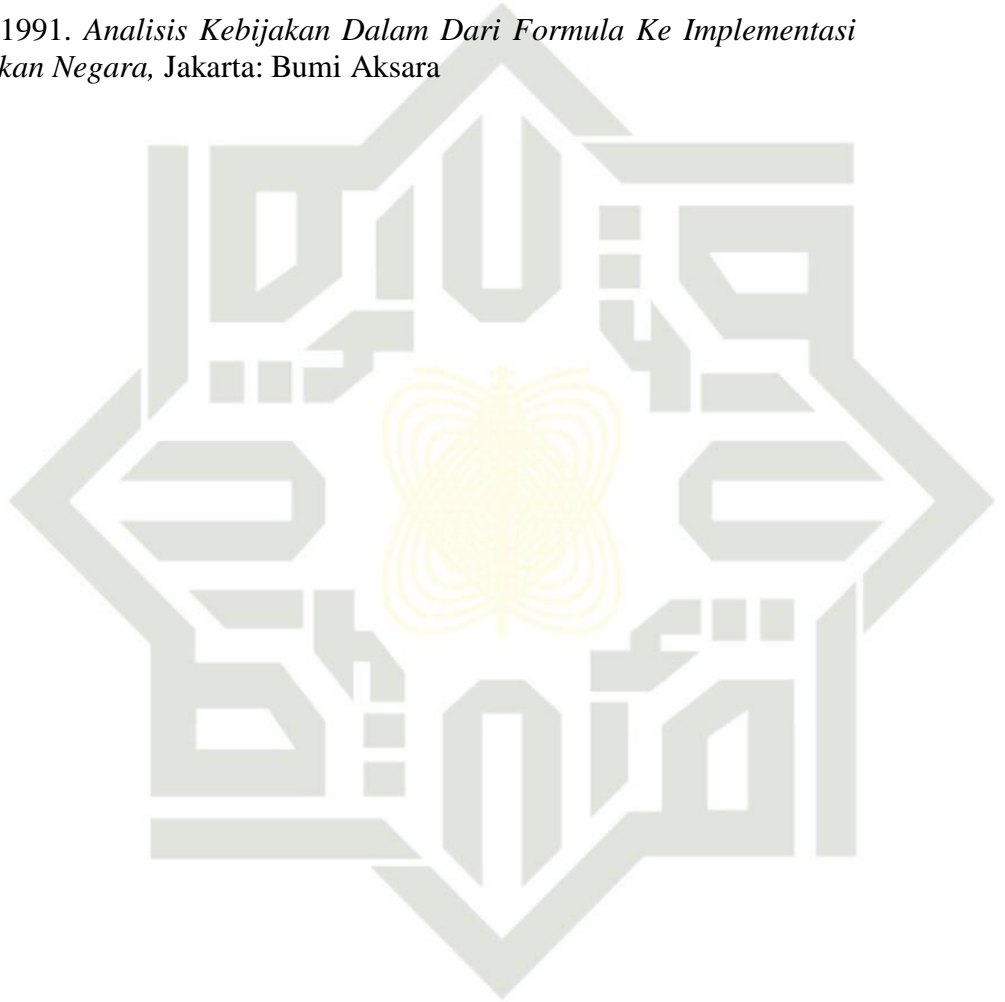
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Surat Edaran Kementrian PUPR No. 02/PRT/M/2016, diakses pada tanggal 1 Desember 2019
- Suharsimi Ari Kunto, 1998. *Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Totok Mardikanto, Purwekerto Soebiyanto, 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Wahab, Abdul, 1991. *Analisis Kebijakan Dalam Dari Formula Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 1

Lembaran Wawancara

Nama :

Hari/Tanggal :

Jabatan :

Lokasi :

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terdapat dalam sampel penelitian seperti yang tercantum, adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Rintis ?
2. Sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan, Apakah ada sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat ?
3. Bagaimana Fasilitator memberikan informasi/pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan yang akan dilaksanakan ?
4. Apakah masyarakatnya bisa bekerjasama dengan fasilitator ?
5. Bagaimana cara menentukan titik pembangunan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Rintis ?
6. Apakah masyarakat ikut terlibat dalam menentukan titik pembangunan yang dilaksanakan dan pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan ?
7. Apakah ada fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ?
8. Bagaimana fasilitator memilih dan menentukan pelaksana pembangunan yang akan dilaksanakan ?
9. Apakah dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya mendukung terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan ?
10. Apakah pembanguana yang dilaksanakan berjalan dengan baik ?
11. Bagaimana kebijakan SOP dalam pelaksanaan pembangunan ?

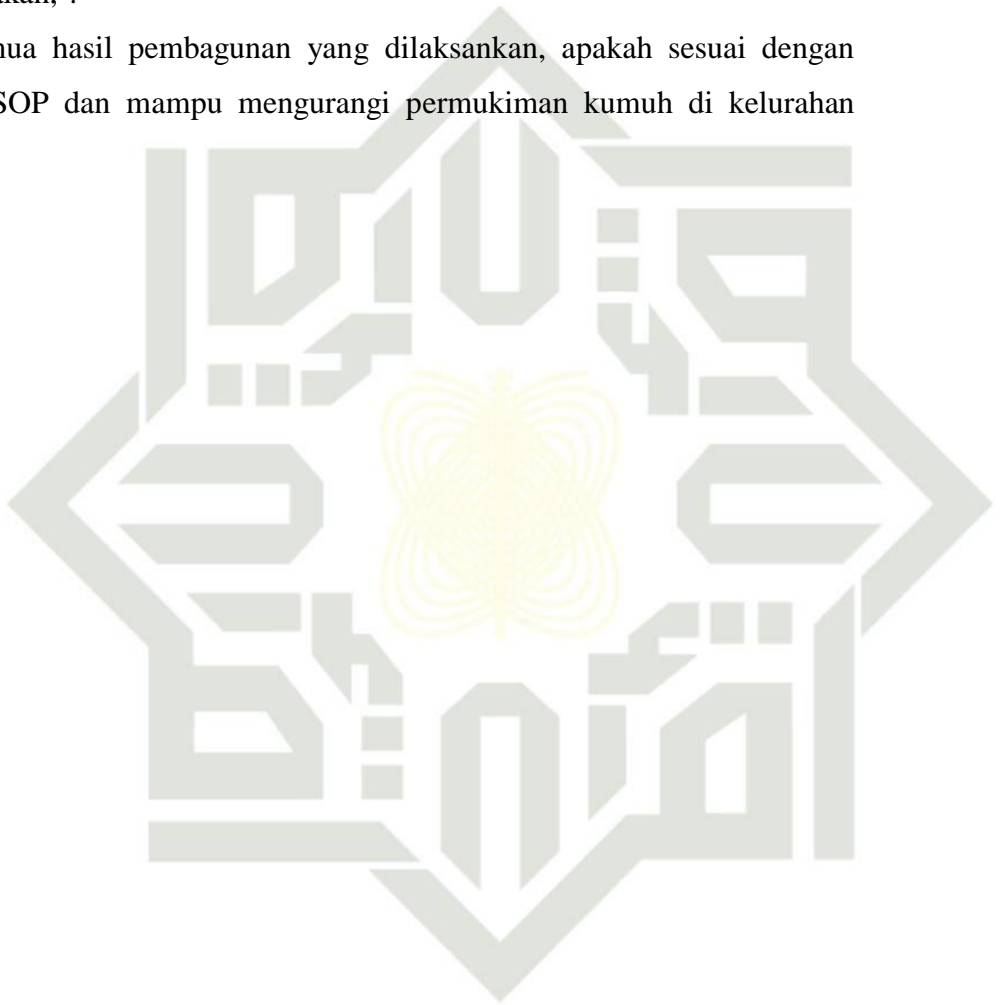
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dari pembangunan yang dilaksanakan, Apakah sesuai dengan SOP KOTAKU ?
3. Dari program pembagunan yang sudah ditetapkan sudah telaksana sesuai dengan target yang ditentukan ?
4. Apakah pembagunan yang dilaksanakan oleh masyarakat berhasil dilaksanakan, ?
5. Dari semua hasil pembagunan yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan standar SOP dan mampu mengurangi permukiman kumuh di kelurahan Rintis ?





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2

Lembaran Observasi

Hari/Tanggal :
 Objek Observasi :
 Tempat Penelitian :

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

B. Aspek yang diamati

Mengamati secara langsung program dan kegiatan yang berhubungan dengan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.



Lampiran 3

Lembaran Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan guna untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Mengumpulkan arsip-arsip dari program dan kegiatan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan permasalahan peneliti.
2. Mengumpulkan foto-foto hasil wawancara dengan informan di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta n
Lampiran 4

Lembaran Dokumentasi

Gambar 1



Dokumentasi kegiatan sosialisasi

Di Kantor Lurah Rintis Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Keluarga

Gambar 2



Dokumentasi hasil program pembangunan jalan lingkungan

Jl. Sultan Syarif Qasim Gg. Keluarga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3



**Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Drainase
Jl. Nurul Ikhsan**

Gambar 4



**Dokumentasi hasil program ruang terbuka hijau
Jl. Hasanudin Gg. Keluarga**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5



Dokumentasi hasil program Air Bersih dan Air Limbah/MCK

Jl. Pelita Gg Budi 2 dan Gg. Budi 4



Pekanbaru, 16 Desember 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal : **NASKAH RISET PROPOSAL**

Lap : 1 Lembar

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sultan Syarif Karim Riau

Di Tempat

Assalamualaikum Warohmatullahi Warbarakatuh

Dengan hormat,

Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa naskah riset proposal saudara :

Nama : **SYARWAN HAMID**

NIM : 11641102061

Jurusan/Smt : Pengembangan Masyarakat Islam / 7 (Tujuh)

Judul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH KOTA KOTA PEKANBARU”**

Untuk dapat dipanggil dan diajukan sebagai salah satu syarat seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatin bapak kami ucapkan terimakasih.

Assalamualaiku Warohmatullahi Wabarakatuh.

PEMBIMBING

Yefri, M.Si

NIP: 197009142014112001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : -
 Lampiran : 1 (satu) Berkas Proposal
 Hal : Pengajuan Pembimbing
 Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di
 Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW semoga keselamatan dan keberkahan – Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Amiin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarwan Hamid
 NIM : 11641102061
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 No. HP : 082384365800

Dengan ini ingin mengajukan permohonan pembimbing proposal dengan judul : **Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.**

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas bantuan dan dukungan bapak Dekan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pemohon,

Syarwan Hamid

UIN SUSKA RIAU



Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/1282/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 12 Maret 2020

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: Syarwan Hamid
N I M	: 11641102061
Semester	: VIII(Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diizinkan untuk sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Un.04/F.IV/PP.00.9/8115/2019

Pekanbaru, 22 Shafar 1441 H
21 Oktober 2019 M

1 berkas
Penunjukan Pembimbing
a.n. Syarwan Hamid
Kepada Yth,
1. Sdra. Yefni, M.Si
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Syarwan Hamid, NIM 11641102061** Dengan judul **"Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mengurangi Pemukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru"** (sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nuldin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

TEMBUSAN :

1. Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
2. Mahasiswa yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1052



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32125 tanggal 16 Maret 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : SYARWAN HAMID
 2. NIM : 11641102061
 3. Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
 5. Jenjang : S1
 6. Alamat : GARUDA SAKTI KM 2
 7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KOTAKU DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU
 8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/32125
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un/04/F.IV/PP.00.9/1282/2020 Tanggal 12 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SYARWAN HAMID |
| 2. NIM/ KTP | : 11641102061 |
| 3. Program Studi | : Pengembangan Masyarakat Islam |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

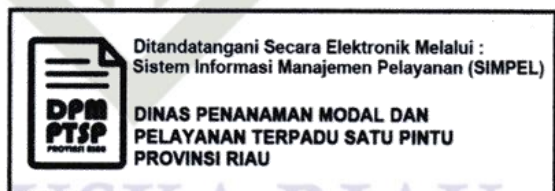
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Maret 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



SYARWAN HAMID lahir di Korabaru Reteh Kecamatan Keritang pada tanggal 09 November 1997. Peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari bapak H. Sulaiman dan ibu Hj Nursiah. Peneliti memulai pendidikan di SDN 018 Seb. Pebenaan pada tahun 2005 dan tamat 2011, kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di MTS An-Nuur Seb. Pebenaan dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat SMP, peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Keritang dan tamat pada tahun 2016. Dan pada tahun yang sama, peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 2023 dan mendapatkan gelar sarjana (S.Sos).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM MENGURANGI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN RINTIS KECAMTAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU”**.